



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOMISI IX DPR RI  
(Bidang : Kesehatan dan Ketenagakerjaan)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 22 (dua puluh dua)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;</li><li>2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;</li><li>3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;</li><li>4. Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.</li></ol>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 11 April 2022
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: Membahas Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia, termasuk Tenaga Kesehatan non ASN dan Tenaga Honorer.
Ketua Rapat	: Charles Honoris / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: <ol style="list-style-type: none"><li>A. Fisik 16 orang Virtual 26 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;</li><li>B. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI: drg. Arianti Anaya, MKM., beserta jajaran;</li><li>C. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI: Dr. H. Teguh Setyabudi, M.Pd., beserta jajaran;</li><li>D. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI: Isa Rachmatarwata, M. Math., beserta jajaran;</li></ol>

E. Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI: Alex Denni, beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dibuka pukul 10.10 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kementerian Keuangan RI untuk:
  - a. melaksanakan secara penuh Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu memastikan bahwa tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  - b. melaksanakan secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khususnya pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat November 2023;
  - c. mempersiapkan tahapan pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS dan memastikan ketersediaan anggaran baik yang bersumber dari APBN dan APBD; dan
  - d. mempersiapkan rencana kontingensi dan mitigasi jika target pengangkatan seluruh tenaga kesehatan non-PNS menjadi PPPK tidak tercapai di tahun 2023 melalui revisi PP No 49 Tahun 2018, sehingga ada kesinambungan pengangkatan sesuai dengan kebutuhan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI untuk:
  - a. memaksimalkan pengangkatan tenaga kesehatan non-ASN yang saat ini tercatat berjumlah 213.249 orang menjadi ASN (PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) tahun 2022, berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui proses verifikasi dan validasi data oleh Kementerian Kesehatan RI; dan
  - b. mengambil kebijakan afirmasi dalam proses seleksi PPPK, dengan memasukkan faktor beban kerja, lama masa kerja, dan pengalaman kerja.

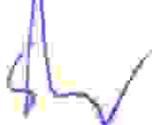
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kementerian Keuangan RI untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan pemerintah mendapatkan pemenuhan kesejahteraan, khususnya menjamin keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri RI untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait guna mengeluarkan kebijakan penetapan gaji standar sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bagi tenaga kesehatan non-ASN di seluruh Indonesia.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kementerian Keuangan RI untuk menyusun peta jalan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia dari pendataan tenaga kesehatan, kebutuhan pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh daerah, rencana distribusinya dan kebutuhan anggarannya.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kementerian Keuangan RI untuk menyampaikan laporan perkembangan pengangkatan tenaga kesehatan non-ASN tahun 2022 paling lambat Desember 2022.
7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kementerian Keuangan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI, paling lambat 18 April 2022.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

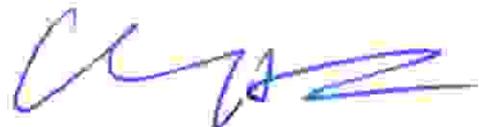
Jakarta, 11 April 2022

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI,



drg. ARIANTI ANAYA, MKM.

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



CHARLES HONORIS

A-162

DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN  
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI,



Dr. H. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI,



ISA RACHMATARWATA, M. Math.

DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI RI,



ALEX DENNI